

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi di wilayah perkotaan tidak serta merta memberikan dampak positif dan bahkan dapat memberikan permasalahan bagi kota tersebut. Pertumbuhan yang terjadi di suatu kota menyebabkan gejala urbanisasi, menjadikan kota sebagai tujuan tempat tinggal baru bagi penduduk-penduduk di luar kota tersebut. Akibatnya, menurut data *Worldbank* pada tahun 2017 menyebutkan 54% atau sekitar 141.480.000 dari total populasi penduduk di Indonesia yang sekitar 262.000.000 tinggal di area perkotaan.<sup>1</sup> Urbanisasi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kepadatan permukiman dan kebutuhan rumah untuk rumah tangga perkotaan; meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar permukiman; dan meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa.<sup>2</sup> Sehingga ketiaksiapan suatu kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan.

Menurut data Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya, total permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2017 adalah sekitar 38. 431 hektar. Dengan rincian 23. 437 hektar berada di wilayah perkotaan dan 11. 957 hektar

---

<sup>1</sup> Katadata. 2017. Jumlah kaum urban di Indoensia lebih banyak disbanding Thailand. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/04/kaum-urban-indonesia-lebih-banyak-dari-thailand> pada 21 Juli 2018

<sup>2</sup> Kementrian Pekerjaan Umum. 2017. Konsep pencegahan permukiman kumuh-KOTAKU. Diakses dari [http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/PokjaPKP/05.\\_Kasubdit\\_Standbag\\_PKP\\_Konsep\\_Pencegahan.pdf](http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/PokjaPKP/05._Kasubdit_Standbag_PKP_Konsep_Pencegahan.pdf)

di pedesaan. Apabila mengacu pada data tersebut, memang terjadi penurunan luas wilayah atau kawasan permukiman kumuh, khususnya di perkotaan.

Salah satu daerah yang memiliki jumlah kawasan permukiman kumuh masih tinggi yaitu Kota Malang. Pada tahun 2015 total wilayah kumuh di Kota Malang mencapai 608,6 hektar dan kelurahan yang wilayah kumuhnya terluas berada di Bareng (81,56 ha); disusul Ciptomulyo (62,6 ha); Penanggungan (53,01 ha); dan Kasin (48,20 ha).<sup>3</sup> Sementara itu jika dirinci per kecamatan, kawasan kumuh terbanyak di Kecamatan Klojen (346,51 ha); Sukun (132,8 ha); Kedungkandang (72,9 ha); Lowokwaru (31,35 ha); dan Blimbing (25,04 ha).<sup>4</sup> Data tahun 2015 ini merupakan acuan awal Pemerintah Kota Malang dalam rangka pengentasan permukiman kumuh. Meskipun pada tahun 2017 masih sangat tinggi yakni sekitar 599,9 ha dengan kondisi dimana masih terdapat 4 wilayah kumuh terbesar yakni Kelurahan Bandungrejosari sekitar 58,46 ha, Kelurahan Kotalama 49,64 ha, Kelurahan Pandanwangi 28,14 ha, dan Kelurahan Tanjungrejo sekitar 27,32 ha.<sup>5</sup>

Data di atas menunjukkan masih tingginya permukiman kumuh di Kota Malang sehingga pemerintah Kota Malang perlu mengambil langkah berupa pembuatan kebijakan atau program yang dapat menangani permasalahan permukiman kumuh.

---

<sup>3</sup> Pemerintah Kota Malang. 2015. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/86/35.73.112/2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Malangtimes. 2017. Inilah empat titik wilayah kumuh terbesar di kota Malang. Diakses dari <http://www.malangtimes.com/baca/17232/20170224/193022/inilah-empat-titik-wilayah-kumuh-terbesar-di-kota-malang/> pada 21 Juli 2018

Dengan harapan dapat meminimalisir jumlah permukiman kumuh yang ada di Kota Malang dan mencapai pembangunan yang layak bagi warga Kota Malang.

Tingginya jumlah permukiman kumuh di Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor. Wijaya (2016) menyebutkan bahwa ada 3 faktor utama yang menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh di Kota Malang yang diantaranya yaitu kepadatan penduduk jumlah penduduk, terbatasnya lahan, dan banyaknya kelompok dengan tingkat perekonomian rendah sehingga sulit untuk mengakses standar hidup yang layak huni.<sup>6</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan fakta yang menunjukkan untuk setiap tahunnya bahwa Kota Malang terus mengalami kenaikan jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Kota Malang, pada tahun 2015 penduduk di Kota Malang berjumlah 851.298 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2016 dengan total penduduk berjumlah 856.410 jiwa.<sup>7</sup> Selain itu, angka kemiskinan di Kota Malang juga masih cukup tinggi meskipun telah mengalami penurunan di tiap tahunnya. Tahun 2015 angka kemiskinan di Kota Malang mencapai 39.100 jiwa dan turun menjadi 37.030 jiwa di tahun 2016.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam visi Kota Malang yang ingin dicapai di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

---

<sup>6</sup> Wijaya, Donny Wahyu. 2016. Perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh studi penentuan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan pemukiman kumuh di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vo 2 No 1 Hal 4

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2017. *Kota Malang dalam Angka*. Malang: Badan Pusat Statistik. Hal 37

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2017. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang, 2008-2016 diambil dari <https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/06/21/540/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-p0-garis-kemiskinan-indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p2-kota-malang-2008-2016.html> pada 26 Mei 2018

Malang Tahun 2013-2018, yaitu “Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”, khususnya dalam upaya mewujudkan misi kesembilan, yaitu “Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu Dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Misi tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, khususnya permukiman kumuh yang masih tinggi jumlahnya di Kota Malang. Maka dari itu, adanya kawasan permukiman kumuh pada ruang kota ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kota Malang untuk menanganinya.

Selain itu, sebagai upaya Pemerintah Kota Malang untuk menangani kawasan permukiman kumuh yang ada di Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Malang. Di dalam Bagian Kedua RP3KP tentang Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada pasal 12 menyatakan komitmen Pemerintah Kota Malang yaitu: Mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan di Kota Malang.<sup>9</sup> Selanjutnya, untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Malang menetapkan luasan kawasan kumuh melalui Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 86 /35.73.112/2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

---

<sup>9</sup> Loc.cit. Wijaya Hal 5

Disamping itu, dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang juga telah membuat dokumen Rencana Kawasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) tahun 2015.<sup>10</sup> Dokumen ini menyatakan bahwa kriteria kawasan permukiman kumuh dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan permukiman antara lain sarana dan prasarana kurang lengkap dan memadai; kondisi bangunan yang kurang memadai; kesehatan lingkungan dan sanitasi yang kurang memadai; permukiman miskin; tingkat pendidikan yang rendah; tingkat pendapatatn rendah; dan tingkat pengangguran dan kerawanan sosial yang tinggi. Atas dasar RKPKP inilah pemerintah Kota Malang berupaya untuk melakukan kebijakan atau program yang dapat mengatsi masalah permukiman kumuh di Kota Malang.

Berdasarkan pada berbagai aspek permasalahan empiris dan dukungan regulasi atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, maka akan sangat penting bagi Kota Malang untuk melaksanakan manajemen atau pengelolaan perkotaan yang tepat dalam rangka penanganan permukiman kumuh di Kota Malang. Menurut Fawahid (2016)<sup>11</sup> manajemen perkotaan di suatu kota dapat dilakukan dengan menerapkan empat fungsi manajemen yang antara lain yaitu fungsi perencanaan yang terdiri atas penetapan tujuan, kebijakan, prosedur dan program; fungsi pengorganisasian yang terdiri atas penetapan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab; fungsi *directing* yang terdiri bimbingan, saran, dan perintah; dan fungsi

---

<sup>10</sup> Ibid Wijaya Hal 6

<sup>11</sup> Fawahid, Ahmad. 2016. Manajemen perkotaan (studi kasus penataan drainase di Kota Pekanbaru). Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/206911/manajemen-perkotaan-studi-kasus-penataan-drainase-di-kota-pekanbaru> pada 25 Mei 2018

pengawasan yang terdiri atas menetapkan alat ukur, mengandalkan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Dalam konteks ini, manajemen perkotaan lebih menekankan pada peran pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam penanganan permukiman kumuh yakni dengan melakukan kegiatan Lomba Kampung Tematik. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Barenlitbangda) dan bertujuan untuk mewujudkan lahirnya 57 kampung tematik baru di tiap kelurahan Kota Malang.<sup>12</sup> Disamping itu program ini juga bertujuan dalam rangka penanganan permukiman kumuh, karena beberapa kampung tergolong kategori kampung kumuh.<sup>13</sup> Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan Kota Malang Bebas Kumuh di tahun 2019.

Selain itu, salah satu kampung yang melakukan pengembangan dalam rangka keikutsertaannya dalam lomba kampung tematik yakni kampung tematik keramat di Kelurahan Kasin. Pada lomba tersebut kampung keramat menjadi juara 3. Kampung keramat merupakan kampung yang dipenuhi dengan berbagai permasalahan khususnya terkait buruknya infrastruktur sehingga daerah digolongkan menjadi permukiman kumuh. beberapa permasalahan yang muncul di Kampung Kermata yakni terkait

---

<sup>12</sup>Malangkota. 2016. Lomba kampung tematik 'Festival Rancang Malang'. Diakses dari <https://malangkota.go.id/2016/08/11/lomba-kampung-tematik-festival-rancang-malang/> pada 12 Oktober 2018

<sup>13</sup> DPUPR Kota Malang. 2016. Festival kampung tematik upaya teguhkan Kota Malang Bebas Kumuh 2019. <https://dpupr.malangkota.go.id/festifal-kampung-tematik-upaya-teguhkan-kota-malang-bebas-kumuh-2019/> pada 12 Oktober 2018

buruknya akses jalan menuju kampung, lokasi yang terletak di bantaran sungai, kondisi drainase yang buruk dan *image* sebagai kampung preman.<sup>14</sup> Permasalahan itulah yang menjadi aspek penting perlunya dilakukan pengembangan kampung tematik keramat agar menjadi kampung tematik yang dapat juga menjadi kampung wisata dan terhindar dari status permukiman kumuh, mengingat data dari SK Walikota tahun 2015 tentang permukiman kumuh di Kota Malang menyebutkan bahwa Kelurahan Kasin tergolong sebagai kelurahan dengan luas wilayah kumuh yang terbesar di Kota Malang dengan sekitar 48,20 Ha.

Seanjutnya, penanganan permukiman kumuh di beberapa daerah lain memiliki beberapa cara dalam pelaksanaan penanganannya. Pada penelitian Syam (2017) mengenai penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ranggas, Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam rangka penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan melakukan Analisis *Strengths, weaknesses, opportunities*, dan *threats* atau (SWOT). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penangan permukiman kumuh yang dilanjutkan dengan melakukan strategi dari pemerintah untuk merespon hasil dari analisis SWOT tersebut.

Sedangkan penelitian Yuliani (2017)<sup>15</sup> menjelaskan bahwa penangan permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kota Surakarta dilakukan dengan memanfaatkan program Kota Tanpa Kumuh yang diturunkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pada pelaksanaan program Kota tanpa Kumuh

---

<sup>14</sup> Proposal Perencanaan Pengembangan Kampung Tematik Keramat tahun 2016

<sup>15</sup> Yuliani, Sri. 2017. Kolaborasi dalam perencanaan program tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta

ini dilakukan secara kolaborasi dengan memenuhi prinsip-prinsip kolaborasi sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Pekerjaan Umum. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas aspek partipasi; komunikasi dan koordinasi; kepercayaan, dan pembagian tugas yang jelas. Dengan adanya kolaborasi tersebut diharapkan aspek perencanaan program Kota tanpa Kumuh dapat berjalan ideal sesuai dengan kondisi atau permasalahan di kota tersebut dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan kampung tematik, Jauhari (2018) menyebutkan pengembangan suatu kampung tematik Pelangi di Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan juga perlunya pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu pengembangan kampung juga harus membutuhkan peran pendampingan dari pemerintah melalui dinas terkait dan bahkan harus berani bekerja sama dengan pihak swasta. Dengan demikian pengembangan kampung tematik akan terlaksana dengan optimal.

Selain itu, penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Program Kota Tanpa Kumuh ini dilakukan secara kolaboratif karena melibatkan banyak *stakeholder* baik di internal instansi pemerintah maupun masyarakat atau sektor swasta. Penanganan permukiman kumuh juga dilakukan dengan melakukan suatu perencanaan skenario yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.

Sementara itu, berdasarkan beberapa metode yang dilakukan dalam penanganan permukiman kumuh, terdapat salah satu konsep penataan atau tata kelola perkotaa yang



dapat dilaksanakan dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan. Tahir (2015)<sup>16</sup> manajemen atau pengelolaan perkotaan dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep *good urban governance*. Konsep ini berupaya untuk merespon berbagai permasalahan pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan melibatkan unsur masyarakat di dalamnya. Dalam *good urban governance* dikenakan beberapa prinsip dalam pengelolaan perkotaan yang terdiri atas prinsip keberlanjutan, subsidiaritas, keadilan, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, keterlibatan masyarakat sipil, dan keamanan. Prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat dalam konteks manajemen atau pengelolaan perkotaan. Konsep *good urban governance* ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan atau tata kota yang baik di suatu daerah, termasuk dalam konteks penanganan permukiman kumuh. Hal ini karena penanganan permukiman kumuh membutuhkan suatu konsep yang tepat dalam penanganannya.

Hal yang menarik dalam penerapan *good urban governance* dalam penanganan permukiman kumuh yakni menyangkut aspek keberlanjutan, pelibatan *civil society*, keadilan dan keamanan bagi masyarakat. prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dalam penanganan permukiman kumuh yang mana menggambarkan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari masyarakat. *good urban governance* diharapkan dapat menciptakan kawasan permukiman yang berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan perkotaan yang seimbangan dalam segi sosial

---

<sup>16</sup> Tahir, Muchlas M. 2015. Good urban governance: peran pemerintah dalam pembangunan wilayah kecamatan di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 8, No 1 Hal 14-15

masyarakat, perhatian terhadap lingkungan, dan mendukung perekonomian masyarakat. selain itu, *good urban governance* juga diharapkan dapat menciptakan tata kelola kota yang aman dari segala ancaman dan bencana bagi setiap warganya tanpa terkecuali. Karena hakikat utama dalam penanganan permukiman kumuh yakni menciptakan permukiman yang layak bagi warga perkotaan.

Selanjutnya, dalam konteks urgensi manajemen perkotaan penanganan permukiman kumuh khususnya melalui pengembangan kampung tematik di Kota Malang merupakan langkah yang penting untuk juga mendukung program lain yang juga berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh seperti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) atau disebut juga dengan program 100-0-100 yang bertujuan menciptakan Kota Malang bebas permukiman kumuh di tahun 2019. Dengan demikian pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mewujudkan target pemerintah pusat, sehingga kedepannya tidak ada lagi permukiman kumuh di Kota Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengembangan kampung tematik berbasis *good urban governance* sebagai upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Malang ?
2. Apa penghambat dalam manajemen pengembangan kampung tematik berbasis *good urban governance* sebagai upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen pengembangan kampung tematik berbasis *good urban governance* sebagai upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat manajemen pengembangan kampung tematik berbasis *good urban governance* sebagai upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Malang.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
  - a. Menambah wawasan dan berbagi informasi bagi kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam aspek mengenai manajemen perkotaan berbasis *good urban governance* dalam pengembangan kampung tematik keramata sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kota Malang.
  - b. Menjadi rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang kedepannya akan membahas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Malang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Batu dan jajaran Organisasi Perangkat Daerahnya serta *stakeholder*

lain seperti masyarakat dalam dalam manajemen perkotaan sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Malang.

- b. Dapat menginspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan dalam manajemen perkotaan sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Malang.

### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual diartikan sebagai definisi-definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lainnya atau mendefinisikan suatu konstruk dengan konstruk lainnya.<sup>17</sup> Suatu definisi harus mampu menggambarkan karakteristik konsep yang didefinisikan secara ensensial dan objektif. Definisi konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah:

#### *1. Good Urban Governance*

*Good Urban Governance* dapat didefinisikan sebagai upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Konsep ini sendiri terdiri atas beberapa prinsip yang selayaknya diterapkan yaitu keberlanjutan (*sustainability*), subsidiaritas (*subsidiarity*), keadilan

---

<sup>17</sup> Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama Hal 119.

(*equity*), efisiensi (*efficiency*), transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*) atau penduduk (*citizenship*), dan keamanan (*secutity*).<sup>18</sup> Beberapa prinsip tersebut saling bergantung dan saling memperkuat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Penerapan prinsip-prinsip *good urban governance* diharapkan dapat menjadi konsep yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan perkotaan yang sedang terjadi.

## 2. Penanganan Kawasan Kumuh

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.<sup>19</sup> Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.<sup>20</sup> Permukiman kumuh merupakan tempat tinggal yang telah mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Penanganan kawasan permukiman kumuh sangat kompleks. Kemetrian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa penanganan kawasan kumuh harus meliputi penanganan pada beberapa aspek seperti penanganan pada kondisi bangunan, infrastruktur jalan,

---

<sup>18</sup> Op.Cit. Tohir Hal 12

<sup>19</sup> Nursyahbani, Raisya. 2015. Kajian karakteristik kawasan permukiman kumuh di kampung kota (Studi kasus: Kampung Gandekan Semarang. Jurnal Teknik PWK Vol 4 No 2015. Hal 3

<sup>20</sup> Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1

drainase lingkungan, pembuangan limbah, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.<sup>21</sup>

### 3. Kampung Tematik

Kampung tematik merupakan upaya untuk menciptakan kampung yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan kearifan lokal. Menurut Majewski dan Zmyslony konsep kampung tematik lebih menawarkan masyarakat untuk terlibat secara proaktif untuk menciptakan tata ruang kampung yang berciri khas dan berkelanjutan.<sup>22</sup> Sedangkan Kloczko-Gajewska Konsep kampung tematik juga merupakan suatu gagasan kreatif yang lahir dari komunitas maupun masyarakat yang disebut juga sebagai sebuah inovasi sosial.<sup>23</sup> Karena dalam prosesnya masyarakat mengembangkan ide dan gagasan baru untuk menciptakan kampung yang kreatif dan berkelanjutan.

### F. Definisi Operasional

Menurut Silalahi, definisi operasional merupakan kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan.<sup>24</sup> Suatu konsep masih bersifat abstrak dan general. Oleh karena itu, perlu dilakukan

---

<sup>21</sup> Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kota Malang. *Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100* Kota Malang. Malang: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Hal 2.4

<sup>22</sup> Tamara, Anindya Putri dan Mardwi Rahdriawan. 2018. Kajian pelaksanaan konsep kampung tematik di kampung hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol 6 No 1 Hal 3

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> *Lok.cit* .Silalahi, Ulber. Hal 119

identifikasi variabel-variabel dari konsep tersebut sehingga mempermudah analisis dalam suatu penelitian. Selain itu, melalui definisi operasional dari suatu konsep sebagai definisi variabel penelitian, akan mengurangi kesalahan pengamatan dalam penelitian. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Manajemen penanganan kawasan kumuh melalui pengembangan kampung tematik keramat
  - a. Pengembangan kampung tematik berkelanjutan pada kampung keramat.
  - b. Pengembangan kampung tematik keramat secara merata
  - c. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kampung tematik keramat
  - d. Mewujudkan kampung tematik keramat yang aman bagi masyarakat
2. Faktor penghambat penanganan kawasan kumuh melalui pengembangan kampung tematik keramat
  - a. Minimnya Sumberdaya Anggaran
  - b. Tidak adanya perencanaan jangka panjang pengembangan kampung tematik keramat
  - c. Adanya kecemburuan sosial dari masyarakat

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> Metode ini mengandalkan data berupa teks dan gambar.<sup>26</sup> Dengan demikian, berbeda dengan metode kuantitatif yang menekankan pada data-data statistik angka, maka penelitian kualitatif berusaha untuk menggali data lisan melalui proses wawancara, data tertulis melalui pengamatan pada dokumen-dokumen, dan perilaku pihak yang diteliti melalui proses pengamatan.

Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Di mana pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.<sup>27</sup> Penelitian yang berupa diskriptif diharapkan hasil penelitiannya mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai kondisi di lapangan dan tidak hanya sekedar sajian data. Selain itu, dengan penelitian kualitatif peneliti akan lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman dalam proses penggalian data di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara nyata praktik penanganan kawasan

---

<sup>25</sup> Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 3

<sup>26</sup> Cresswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 245

<sup>27</sup> Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA. Hal 5



permukiman kumuh melalui pengembangan kampung tematik keramat di Kelurahan Kasin Kota Malang melalui pendekatan *good urban governance*.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat dipahami sebagai pihak/orang yang nantinya menjadi sampel dalam penelitian dan menjadi pihak yang terwawancarai atau informan. Apabila dalam penelitian kuantitatif sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian kualitatif sampel merupakan orang-orang yang dipandang tahu terkait situasi sosial tertentu. Penentuan orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>28</sup> Pada saat mengembangkan sebuah *purposive sampling*, peneliti menggunakan pengetahuan dan pemahamannya tentang suatu kelompok untuk memilih subjek yang mewakili untuk diteliti.<sup>29</sup> Berdasarkan *purposive sampling*, peneliti menentukan beberapa informan atau subjek penelitian yang dianggap mengetahui dalam penelitian ini yang mana terdiri dari pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah; pegawai Kelurahan Kasin, dan Pengurus Pokdarwis Kelurahan Kasin dengan rincian sebagai berikut ini:

**Tabel 1.1 Subjek Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Yanuar	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan dan Teknologi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang

---

<sup>28</sup>*Ibid.* Hal 216

<sup>29</sup> Berl, L. Bruce. 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. California: Allyn & Bacon. Hal 33

2	Widya	Staff Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang
3	Yuyun Ekawati	Kepala Kelurahan Kasin Kota Malang
4	Anik	Staf Pegawai Kelurahan Kasin Kota Malang
5	Reni	Pengurus Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kasin

Sumber: Peneliti, 2018

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat harus didukung dengan sumber informasi dan data yang valid. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga data harus didapatkan dari sumber yang terpercaya. Hal tersebut guna mendukung kaidah keilmiahan dan memperoleh data yang didapatkan dari sumber yang relevan. Menurut Sugiyono terdapat dua sumber data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer atau sekunder.<sup>30</sup> Maka dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat dua sumber data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika suatu peristiwa terjadi.<sup>31</sup> Data primer yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi informan. Adanya informasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat, dapat menggali

<sup>30</sup>*Op.cit*, Hal 225.

<sup>31</sup>*Lok.cit*, Silalahi, Ulber. Hal 289.

fenomena yang akan diteliti secara lebih mendalam. Dengan demikian data primer diperoleh dari beberapa informan yang meliputi pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah; pegawai Kelurahan Kasin, dan Pengurus Pokdarwis Kelurahan Kasin

#### b. Data Sekunder

Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.<sup>32</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan SK Walikota Malang tahun 2015 tentang Penentuan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Dokumen Strategi Pencapaian 100-0-100 Penangan Permukiman Kumuh Kota Malang, dan Dokumen proposal perencanaan pengembangan kampung tematik keramat tahun 2017. Selain itu data sekunder juga bisa berasal dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Observasi

Observasi adalah perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dapat berupa perilaku yang dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Tujuan tersebut adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, individu-individu yang terlihat beserta aktivitas yang berlangsung dalam

---

<sup>32</sup> Sarwono, Jonathan. 2007 Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS, Yogyakarta : Andi Offset. Hal 123

lingkungan yang diamati dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.<sup>33</sup> Sedangkan merujuk pada pengertian bahasa, pengertian dari observasi adalah memperhatikan dan mengamati. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa observasi adalah berupa metode pengumpulan data dengan melaksanakan kegiatan pengamatan.

Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi yang lebih mendetail dan kejelasan dari setiap fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik pengamatan. Peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat situasi, kondisi dan aktifitas yang terjadi dilapangan, sehingga akanmendapatkan data-data yang relevan dengan fokus dan masalah yang diteliti. Peneliti menyatakan secara terus terang kepada objek yang diteliti, bahwa sedang melakukan kegiatan penelitian. Jadi gambarannya mereka yang menjadi objek penelitianakan mengetahui kegiatan penelitian mulai dari awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti. Mengawali kegiatan penelitian, peneliti melaksanakan observasi dengan pra penelitian. Pra penelitian ini kegiatannya meliputi kegiatan wawancara, mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang lain adalah informan yaitu orang yang memberikan jawaban atas

---

<sup>33</sup> Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. hlm. 131-132

pewawancara.<sup>34</sup> Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara baku terbuka, yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku dan para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai sehingga mereka yang diwawancarai memahami dan mengetahui maksud tujuan wawancara itu. Dengan jenis wawancara tersebut informan dapat menjawab secara bebas dan permasalahan yang termuat dalam pertanyaan dapat terjawab dengan baik. Definisi dari wawancara menurut ahli adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan resmi instansi yang diteliti.<sup>35</sup> Moleong mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam teknik dokumentasi.<sup>36</sup> Pada umumnya, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar, foto-foto, rekaman wawancara, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari instansi yang diteliti.

### 5. Fokus Penelitian

Fokus kajian penelitian ini yakni mengenai manajemen perkotaan dalam perspektif *good urban governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota

---

<sup>34</sup>Lok.cit. Moleong, Lexy. Hal. 186

<sup>35</sup>Opcit. Hal 143

<sup>36</sup>Opcit, Hal. 217-218

Malang. penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip *good urban governance* yang antara lain yaitu prinsip keberlanjutan, keadilan, akuntabilitas dan transparansi, keterlibatan masyarakat, dan keamanan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen perkotaan permukiman kumuh di Kota Malang.

## **6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi seperti di ruangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang dan lokasi-lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan urian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Salah satu model analisis data dalam penelitian kualitatif dikemukakan oleh Creswell, dimana proses analisis data dapat dilangsungkan secara bersamaan pada saat pengumpulan data dan penulisan temuan.<sup>37</sup> Berikut ini merupakan model analisis data kualitatif menurut Creswell yang terdiri dari 6 tahapan.

### **a. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis**

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data sesuai jenisnya dan

---

<sup>37</sup> Op.cit. Cresswell. Hal 260

berdasarkan pada sumber informasi terkait. Pada tahapan ini, peneliti berusaha untuk menyiapkan data dan informasi yang memiliki korelasi dengan aspek manajemen perkotaan sesuai dengan penerapan *good urban governance* di Kota Malang.

b. Membaca keseluruhan data

Langkah awal yang perlu dilakukan yakni dengan membangun gagasan umum atau *general sense* atas sebuah informasi yang didapat dan menjadi suatu refleksi makna informasi tersebut secara menyeluruh. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengacu pada konteks apa dan bagaimana informasi yang terkandung dalam suatu data dan kesan yang timbul serta kredibilitas dari informasi yang diperoleh. Pada tahapan ini perlu dilakukan pencatatan secara khusus atas gagasan-gagasan umum yang menyangkut aspek manajemen perkotaan sesuai dengan penerapan *good urban governance* di Kota Malang.

c. Menganalisis lebih detail dengan men-coding data

*Coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat dan paragraf atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari informan. Pada tahapan ini dilakukan proses reduksi yang mana termasuk dalam sub tema, penerapan

dan faktor penghambat dalam penerapan *good urbane governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Malang.

d. Menerapkan proses *coding*

Tahapan ini yakni dengan menggambarkan tentang *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema untuk selanjutnya dilakukan analisis. Deskripsi yang dilakukan menyangkut penyampaian informasi secara detail mengenai subjek penelitian, lokasi, dan peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada dalam proses penelitian tentang penerapan *good urbane governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Malang.

e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif yang meliputi: pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu atau keterhubungan antar tema dalam menyajikan hasil analisis. Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan hasil analisis melalui pendekatan naratif terkait dengan penerapan *good urbane governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Malang.

f. Menginterpretasi atau memaknai data

Interpretasi dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori. Pada tahapan akhir ini, peneliti pastinya akan memberikan interpretasi menurut pendapat pribadi dan



menyangkutpautkannya dengan teori dan literatur yang sesuai penerapan *good urbane governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Malang.

